

KONFLIK INTERNAL PDI PERJUANGAN TAHUN 2005-2009

INTERNAL CONFLICT PDI PERJUANGAN 2005-2009

Ahmad Faisol, Sunarlan dan IG. Krisnadi

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail : sunarlan.2010@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas konflik internal PDI Perjuangan saat pelaksanaan Kongres II di Bali tahun 2005. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini menyangkut beberapa faktor penyebab konflik internal, proses konflik antara PDI Perjuangan dengan Gerakan Pembaharuan serta dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya PDP terhadap hasil perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2009. Sumber penulisan yang menjadi dasar pembahasan dalam artikel ini berasal dari buku bacaan, surat kabar serta hasil wawancara dengan sumber primer dan sekunder. Setelah gagal menuntut hasil Kongres II, Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan membentuk PDP untuk bersaing di Pemilu 2009, namun hanya memperoleh kurang dari 1% suara. Selain itu PDI Perjuangan juga mengalami penurunan suara, bahkan tidak mampu mengusung Megawati kembali sebagai presiden. Artikel ini menunjukkan bahwa keberadaan oligarki politik berdampak pada proses konflik internal yang berakibat pada perpecahan partai dan kemerosotan suara hasil pemilu.

Kata kunci: Oligarki, konflik, perpecahan.

ABSTRACT

This article discusses the internal conflict of PDI Perjuangan during the implementation of Congress II in Bali, 2005. The problems investigated in this article are: factors causing internal conflict, the conflict process between PDI Perjuangan with Gerakan Pembaharuan as well as the impact of PDP formation on the voting results of PDI Perjuangan in the 2009 election. The sources which become the basis of discussion are books, newspapers and interview results with primary and secondary sources. After failing to prosecute the results of Congress II, Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan formed PDP to compete in the 2009 election, but only gaining less than 1% of the voters. In addition, PDI Perjuangan also got a decreasing number of voters and was unable to promote Megawati as a president once more. This article showed that the existence of a political oligarchy had impact on the process of internal conflict that caused the disintegration of the party the decline in number of voters in the election.

Keyword: *Oligarchy, conflict, disintegration*

1. Pendahuluan

Guna memperbaiki kondisi internal PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan menyarankan percepatan pelaksanaan Kongres dan terselenggara pada tahun 2000 di Semarang. Menjelang Kongres Dimiyati Hartono dan Eros Djarot berinisiatif untuk mengurangi beban tanggungjawab yang diemban Megawati melalui pencalonan Sekjen. Di balik rencana tersebut justru menimbulkan fitnah, mereka berdua

dianggap ingin menggeser Megawati dari kursi ketua umum PDI Perjuangan, sehingga mereka tersingkir dari keanggotaan partai (Wawancara dengan Heri Purwanto mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, 12/02/2013).

Tahun 2001 Megawati dipilih menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dalam kondisi tersebut semakin

menguntungkan posisi PDI Perjuangan untuk merealisasikan berbagai program sesuai dengan jargon sebagai partai “*wong cilik*”, namun hal itu tidak terlaksana secara maksimal dan cenderung mengalami penyimpangan. Beberapa anggota legislatif ditingkat daerah justru terlibat berbagai kasus yang mencoreng PDI Perjuangan dan disinyalir didukung oleh Sutjipto, Pramono Anung dan Gunawan Wirasuroyo (*The Gang Of Three*). Di samping itu berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintahan Megawati juga cenderung tidak pro dengan rakyat, dan berdampak pada terjadinya aksi demonstrasi. Eros Djarot kemudian membentuk Poros Indonesia yang terdiri dari berbagai tokoh untuk mengakomodasi tuntutan rakyat terhadap pemerintahan Megawati (Detik. com, 13/06/2000, diunduh 12/10/2012). Kemudian tahun 2002, Dimiyati Hartono yang telah tersingkir dari PDI Perjuangan membentuk Partai Indonesia Tanah Airku (PITA). Pembentukan PITA dan keberadaan Koalisi Kebangsaan yang tidak efektif, membuat Eros Djarot membentuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan siap bertarung pada Pemilu 2004. Kemunculan dua partai yang dibentuk oleh mantan anggota PDI Perjuangan tersebut menjadi awal munculnya perpecahan akibat dari konflik internal PDI Perjuangan di era reformasi (Wawancara dengan Pudjo Setijono mantan anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, 13/02/2013).

Memasuki pelaksanaan hasil Pemilu legislatif tahun 2004, berbagai permasalahan yang menimpa PDI Perjuangan dan kinerja pemerintahan Megawati membuat posisi partai tersebut mengalami kemerosotan suara, bahkan digeser oleh Golkar. Hasil pemilu tersebut menjadi jawaban dan pelajaran bagi PDI Perjuangan bahwa legitimasi rakyat sudah berkurang. Memasuki pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, PDI Perjuangan mengusung Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, namun mereka kembali mengalami kekalahan sampai pada putaran II. Kekalahan beruntun tersebut kemudian membuat Kwik Kian Gie membentuk Gerakan Pemurnian PDI Perjuangan dan menuduh ‘*The Gang Of Three*’ sebagai penyebabnya, namun gerakan tersebut tidak mendapat dukungan dan berhenti di tengah jalan. Kemudian menjelang pelaksanaan Kongres II PDI Perjuangan di Bali tahun 2005, Arifin Panigoro mengundurkan diri dari anggota DPR-

RI Fraksi PDI Perjuangan. Langkah yang diambil tersebut justru sebagai pemicu munculnya Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan yang menginginkan modernisasi partai (Tempo Interaktif, 18/01/2005, di unduh 12/05/2012).

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penting, antara lain:

1. Menyangkut latarbelakang konflik internal PDI Perjuangan sebelum pelaksanaan Kongres II di Bali tahun 2005.

2. Proses konflik PDI Perjuangan dengan Gerakan Pembaharuan.

3. Dampak terbentuknya PDP terhadap hasil suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2009.

Konflik internal yang terjadi pada PDI Perjuangan bukan merupakan suatu peristiwa tunggal di Indonesia, karena kecenderungan partai politik selalu memunculkan kelompok kecil dalam partai yang menjadi penentu utama. Guna memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka teori Robert Michel mengenai oligarki politik digunakan sebagai teori awal identifikasi konflik internal dalam partai politik. Menurutnya bentuk luar demokrasi yang menandai kehidupan partai-partai politik dengan mudah menutupi para pengamat dari kecenderungan menuju aristokrasi, atau sedikit menuju oligarki dan menjadi sifat dalam setiap organisasi partai, sehingga eksistensi suatu organisasi partai selalu menunjukkan kehadiran oligarki. Sehingga adanya hal itu menjadi ciri penting bahwa keberadaan oligarki dalam partai politik adalah untuk mengekalkan kekuasaan sendiri dan membuat aspek nepotisme menjadi sangat wajar (Ichlasul Amal, Budi Winarno, 1997: 195). Kondisi tersebut sangat relevan dengan keberadaan Megawati dalam PDI Perjuangan. Berawal dari keyakinan sebagai simbol pemersatu internal partai dan bergeser pada pengkultusan terhadapnya hingga melampaui kepentingan partai dan ideologi. Kemudian keberadaan oligarki politik dalam partaimenimbulkan porsi kekuasaan tidak seimbang dan memunculkan kelompok baru untuk menggeser kelompok yang sudah berkuasa, sehingga untuk menganalisis perpecahan tersebut secara berkesinambungan, penulis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Menurutnya struktur sosial dalam masyarakat memiliki wajah ganda yang berpotensi terhadap terjadinya konflik dan konsensus, karena tanpa adanya konsensus dalam struktur sosial masyarakat suatu konflik tidak akan terjadi.

Kemudian terjadinya konflik tersebut disebabkan oleh suatu kekuasaan yang berbeda dan terdapat pada posisi yang ditempati. Selanjutnya bahwa kekuasaan memiliki dua unsur, yaitu unsur kekuasaan antara orang yang menguasai (atasan) dan unsur orang yang dikuasai (bawahan). Kekuasaan kelompok (atasan) selalu ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka yang berada dibawah (bawahan) selalu ingin melakukan perubahan jika tidak ada kontrol sosial dari atas, sehingga pada akhirnya konflik merupakan fenomena struktur sosial dalam masyarakat yang selalu menciptakan perubahan dan perkembangan (Ralf Dahrendorf, 1986:198).

Selanjutnya ada empat metode tahapan yang dilakukan penulis untuk menyusun artikel ini, antara lain meliputi pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, Interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003: 15). Setelah penulis mampu menentukan tema yang bersangkutan dengan sejarah politik maka langkah pertama yang dilakukan adalah kegiatan pencarian sumber sejarah. Dalam pencarian tersebut penulis dibekali pengetahuan bahwa ada dua macam sumber dalam penelitian sejarah, yaitu sumber yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder. Sumber yang bersifat primer merupakan sumber yang berasal dari orang yang menjadi saksi atau pelaku secara langsung dalam sebuah peristiwa, sedangkan sumber sekunder merupakan suatu sumber sejarah yang berasal dari siapapun yang bukan sebagai seorang saksi atau pelaku langsung (Lois Gottschalk, 1983: 35). Penulis kemudian melakukan usaha penelusuran sumber tersebut ke Jakarta, Surabaya dan Solo. Sumber primer yang didapatkan berupa hasil wawancara dengan beberapa tokoh dan mantan kader PDI Perjuangan serta tokoh PDP, selain itu penulis juga mendapatkan berbagai surat kabar yang membahas mengenai keberadaan PDI Perjuangan periode 1999 sampai dengan tahun 2005. Sedangkan untuk sumber sejarah yang bersifat sekunder, penulis hanya mendapatkan beberapa buku yang mengulas secara kritis mengenai keberadaan PDI Perjuangan. Selanjutnya penulis melakukan tahap verifikasi (kritik sumber) untuk mendapatkan sumber yang otentik dan kredibel, terutama yang terkait dengan perbedaan pendapat antara pihak PDI Perjuangan dengan pihak PDP dalam proses konflik tersebut, penulis juga melakukan kroscek berita yang termuat di media surat kabar.

Selanjutnya setelah melakukan proses tersebut penulis melakukan Interpretasi (analisis) atau penafsiran terhadap peristiwa tersebut, hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan gambaran secara kronologis. Tahapan terakhir penulis melakukan historiografi berdasarkan pada data dan fakta yang telah melawati tiga proses tahapan. Dalam penulisan skripsi ini memuat sifat penulisan deskriptif analitis yang bermaksud memberikan gambaran keadaan sebelum dan sesudah Kongres di Bali, yang berdampak bagi kondisi politik di tubuh PDI Perjuangan. Analisis terhadap data-data yang didapat dari sumber-sumber sejarah, selanjutnya dijelaskan melalui aspek kausalitas. Di tambah dengan konsep 5W+1H yang merupakan metode terpenting dalam menarik benang merah permasalahan yang dikaji. Sehingga analisa dengan menggunakan berbagai teori diatas mempunyai relevansi mengungkapkan berbagai peristiwa secara kronologis.

2. Dinamika Politik Internal PDI Perjuangan Sebelum Kongres II di Bali Tahun 2005

Keharmonisan politik internal PDI Perjuangan hanya bertahan sebentar. Kemenangan Pemilu 1999 dan terpilihnya Megawati menjadi wakil presiden kemudian menimbulkan permasalahan internal baru. Menjelang Kongres I di Semarang tahun 2000 Dimiyati Hartono dan Eros Djarot berencana bersaing memperebutkan posisi Sekjen, namun rencana tersebut justru menimbulkan wacana bahwa mereka berdua ingin menggeser Megawati dari posisi kursi ketua umum PDI Perjuangan (Wawancara dengan Heri Purwanto mantan anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, 2013). Memasuki pelaksanaan Kongres I tersebut, Megawati diangkat kembali secara aklamasi sebagai ketua umum hingga tahun 2005, sebaliknya keputusan tersebut juga menghasilkan keputusan buruk bagi Dimiyati Hartono dan Eros Djarot, mereka tersingkir dari kepengurusan bahkan dipinggirkan dari PDI Perjuangan (www. Tempo Interaktif, 08/04/2005, di unduh 12/01/2013: 12.30 wib). Memasuki tahun 2001 merupakan tahun keberuntungan bagi PDI Perjuangan, karena Megawati menggantikan posisi Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Posisi PDI Perjuangan sebagai partai penguasa akhirnya berbuah berbagai tindakan yang mencoreng nama partai, karena para kader elit sampai tingkat daerah banyak yang melakukan

tindakan cenderung menyimpang dari garis ideologi. Mereka banyak terjat dengan berbagai kasus, baik korupsi dan perbuatan kriminal lainnya. Selain itu, ditingkat pemerintahan yang dijalankan Megawati juga banyak menimbulkan sikap kontroversi. Berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak yang tidak sesuai harapan. Demonstrasi terhadap kebijakan pemerintahan Megawati juga sering terjadi. Sehingga dengan demikian PDI Perjuangan dan Megawati tidak bisa memanfaatkan posisinya sebagai subjek penguasa. Bersamaan dengan perjalanan pemerintahan Megawati tersebut, di tempat lain Dimiyati Hartono mendirikan Partai Indonesia Tanah Airku (PITA). Lantas Eros Djarot juga mendirikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). Terbentuknya dua partai tersebut dapat dijadikan acuan bahwa sebagai partai politik PDI Perjuangan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai peredam konflik politik internalnya.

Memasuki pelaksanaan Pemilu legislatif 2004 menjadi momentum berharga bagi PDI Perjuangan, karena partai ini mengalami penurunan suara, bahkan terkalahkan oleh Golkar, karena hanya memperoleh 18,31% suara.

Hasil Pemilu Legislatif 2004

No	Partai	Hasil (%)
1.	Golkar	21,62%
2.	PDI Perjuangan	18,31%
3.	PKB	10,61%
4.	PPP	8,18%
5.	Demokrat	7,46%

Sumber: KPU Pusat.

Selanjutnya kekalahan tersebut tidak menjadikan PDI Perjuangan menyerah, karena selain memilih anggota legislatif, pada Pemilu 2004 juga diteruskan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. PDI Perjuangan kemudian tetap mengusung Megawati yang dipasangkan dengan Hasyim Muzadi, namun formasi tersebut gagal. Mereka terkalahkan oleh

pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang merupakan mantan menteri pemerintahannya. Sehingga kekalahan tersebut menjadi bukti kongkrit bahwa PDI Perjuangan dan Megawati belum siap menerima kemenangan politik di era transisi reformasi.

Kekalahan beruntun PDI Perjuangan tersebut kemudian membuahkan sikap kritis di kalangan internal partai. Kwik Kian Gie kemudian membentuk Gerakan Pemurnian dan menuduh kekalahan tersebut disebabkan oleh pengurus DPP PDI Perjuangan yang disebut "*The Gang Of Three*", namun meski mendapat dukungan dari kalangan elit internal partai, gerakan tersebut berhenti ditengah jalan (www. Tempo Interaktif, 30/10/2004, di unduh 12/05/2012, 10.30 wib). Meski tidak ada hubungan dengan Gerakan Pemurnian, di tempat lain menjelang pelaksanaan Kongres II di Bali tahun 2005 Arifin Panigoro membentuk Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan yang bertujuan untuk modernisasi partai (www. Tempo Interaktif, 18/01/2005, di unduh 12/05/2012, 11.30 wib).

Kemunculan dua gerakan internal yang bersifat kritis tersebut menjadi parameter bahwa kondisi internal PDI Perjuangan sedang mengalami masa krisis kepercayaan, dimana sebagai pengurus partai secara mayoritas tidak bisa menjalankan kinerja politik akibat melemahnya konsolidasi di tingkat partai.

3. Pelaksanaan Kongres II PDI Perjuangan di Bali Tahun 2005

Jika pada pelaksanaan Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000 tidak pernah diramaikan dengan pencalonan ketua umum selain Megawati, hal itu berbeda dengan pelaksanaan Kongres II di Bali tahun 2005. Menjelang pelaksanaan Kongres tersebut, Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan justru membuat banyak pilihan calon ketua umum, antara lain Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Laksamana Sukardi, Sophan Sopian dan Guruh Soekarnoputra (www. Suara Merdeka, 23/01/2005, di unduh 11/07/2012, 11.10 wib). Banyaknya calon yang ingin bersaing dengan Megawati tersebut seolah menunjukkan bahwa kesadaran politik internal PDI Perjuangan sudah mulai berkembang di samping kuatnya pengkultusan terhadap Megawati.

Menjelang pelaksanaan Kongres II PDI Perjuangan tersebut, suasana politik internal partai semakin memanas. Megawati menganggap

mereka yang mencalonkan diri sebagai ketua umum belum memiliki pengalaman dan tidak mempunyai dukungan di tingkat akar rumput. Bahkan Megawati menyarankan agar mereka mengurungkan niat tersebut, karena dapat menimbulkan perpecahan (www. Suara Merdeka, 28/01/2005, di unduh 12/12/2012, 09.30 wib). Di sisi lain pernyataan tersebut menurut Gerakan Pembaharuan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi, karena mereka yakin semua kader PDI Perjuangan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai. Lantas keberadaan Gerakan Pembaharuan tersebut memecah dukungan internal PDI Perjuangan, namun secara mayoritas dukungan terhadap Megawati masih sangat besar. Menjelang pelaksanaan Kongres II tersebut, empat tokoh yang akan maju bersaing secara mendadak mengundurkan diri, sehingga Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan hanya mengusung Guruh Soekarnoputra sebagai calon ketua umum. Ternyata langkah tersebut sia-sia, panitia Kongres justru merubah sistem pemilihan ketua umum menjadi sistem blok, yaitu satu DPC hanya memiliki satu suara. Sehingga secara matematis dukungan terhadap Guruh Soekarnoputra mengalami pengurangan suara secara signifikan. Menyaksikan kondisi tersebut Guruh Soekarnoputra mengambil keputusan sepihak dengan mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum PDI Perjuangan. Imbasnya langkah tersebut menimbulkan perdebatan dalam Gerakan Pembaharuan. Selanjutnya strategi yang dilakukan panitia Kongres mengantarkan Megawati kembali menduduki kursi ketua umum PDI Perjuangan secara aklamasi (www. Bali Post, 01/04/2005, di unduh 10/03/2013, 22.30 wib). Kegagalan rencana yang disusun Gerakan Pembaharuan tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan Megawati dalam partai tidak dapat digeser, apalagi dengan rencana mengusung Guruh Soekarnoputra yang tidak memiliki ikatan historis secara kuat di kalangan pendukung dan simpatisan.

Di satu sisi Kongres II PDI Perjuangan tersebut terlaksana sesuai rencana, namun di sisi lain bagi Gerakan Pembaharuan hasil tersebut tidak sesuai AD/ART partai, sehingga pasca pelaksanaan Kongres tersebut Gerakan Pembaharuan melakukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar dan Pusat, namun usaha yang dilakukan mengalami kegagalan (www. Tempo Interaktif, 12/05/2005, di unduh

27/04/2013, 20.11wib). Selanjutnya guna menerapkan disiplin elit partai, pengurus DPP PDI Perjuangan memberikan surat pemecatan bagi beberapa kader yang terlibat dengan gerakan tersebut. Uniknya para elit yang terlibat, seperti Roy BB Janis, Noviantika Nasution, Laksamana Sukardi, Sophan Sopian justru tidak terima dengan pemecatan tersebut. Mereka kemudian melaporkannya ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik, namun mereka juga mengalami kegagalan karena tidak ditemukan bukti kuat (www. Aneka Warta, 03/08/2005, di unduh 01/05/2013, 11.10 wib). Kegagalan beruntun yang dialami Gerakan Pembaharuan pasca pelaksanaan Kongres II PDI Perjuangan di Bali tersebut tidak membuat mereka menghentika langkah perjuangan untuk menuntut kebenaran. Gerakan Pembaharuan kemudian menyelenggarakan sarasehan nasional dengan tujuan untuk memperkuat konsolidasi memperbaiki kondisi internal PDI Perjuangan. Uniknya ditengah acara sarasehan tersebut muncul gagasan dari salah satu peserta untuk mendirikan partai baru, meski tujuan utama gerakan tersebut bukan untuk mendirikan partai. Setelah melewati musyawarah menuju mufakat, akhirnya Gerakan Pembaharuan melalui acara tersebut mendeklarasikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) (www. Tempo. com, 12/01/2005, di unduh 09/08/2013, 21.20 wib).

4. Dampak Konflik Internal PDI Perjuangan Terhadap Hasil Pemilu 2009.

Terbentuknya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) oleh sejumlah mantan tokoh PDI Perjuangan melalui Gerakan Pembaharuan menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan internal PDI Perjuangan, namun mayoritas tanggapan bersifat dingin (www.Tempo Interaktif. com, 1/12/2005, di unduh 12/11/2013, 22.30 wib). Tokoh elit PDI Perjuangan justru menganggap terbentuknya PDP tidak membawa sesuatu yang baru, karena kader di daerah lebih percaya pada Megawati. Selain itu mereka beranggapan bahwa PDI Perjuangan tidak membutuhkan kader yang oportunis (www.Tempo Interaktif.com, 02/12/2005, di unduh 12/11/2013, 12.30 wib). Perjalanan politik antara PDI Perjuangan dan PDP menuju Pemilu 2009 selanjutnya selalu diliputi oleh persaingan. Selain PDP tidak mau dianggap sebagai partai pecahan PDI Perjuangan, mereka juga yakin bahwa pelaksanaan Pemilu 2009 adalah ujung

dari jawaban permasalahan internal PDI Perjuangan.

Selanjutnya proses Pemilu tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 April yang diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai lokal khusus di Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. PDI Perjuangan dan PDP memiliki optimisme memperoleh hasil yang signifikan. Meski demikian keberadaan Golkar dan partai Demokrat sebagai partai penopang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa dipandang sebelah mata kedua partai tersebut punya keunggulan dan berpotensi menggeser kantong-kantong suara di berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh PDI Perjuangan. Celakanya sebagai partai baru, PDP belum memiliki basis massa yang jelas, apalagi pengaruh PDI Perjuangan di daerah mengalami keterpurukan.

Memasuki proses penghitungan suara, hasilnya barang tentu sudah dapat diprediksi, terutama menyangkut kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla periode 2004-2009 yang berdampak positif terutama bagi partai Demokrat. Memasuki hasil akhir penghitungan suara nasional yang diterbitkan KPU pusat, ternyata prediksi tersebut tidak meleset.

Hasil Pemilu legislatif tahun 2009

No.	Partai	Hasil (%)
1.	Partai Demokrat	26,75%
2.	Golkar	19,10%
3.	PDI Perjuangan	14,01%
4.	PKS	10,36%
5.	PAN	7,80%

Sumber: (Mukhtie Fajar, 2013: 11)

Posisi Golkar sebagai pemenang Pemilu tahun 2004 mampu digeser oleh Partai Demokrat dengan perolehan 26,75% suara dan Golkar menempati posisi ke dua dengan perolehan 19,10% suara. Hasil yang diperoleh partai Demokrat merupakan jumlah yang sangat fantastis karena naik lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan perolehannya pada Pemilu 2004. Berbeda dengan PDI Perjuangan, pada pelaksanaan Pemilu 2009 partai tersebut justru mengalami penurunan suara yang sangat

memprihatinkan, hanya memperoleh 14,03% suara.

Kekalahan PDI Perjuangan pada pelaksanaan Pemilu 2004 ternyata tidak dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki partai dan konflik internal juga masih menjadi menu utama PDI Perjuangan dalam setiap langkahnya. Padahal diluar, seperti hanya partai Demokrat melakukan berbagai upaya dalam mendongkrak popularitasnya melalui berbagai program pemerintah. Dampak dari konflik internal yang melanda PDI Perjuangan tersebut kemudian menjadi bomerang secara statis, ditambah dengan anemo masyarakat yang menganggap bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla lebih baik dari pada masa pemerintahan Megawati. Selain itu pada pelaksanaan Pemilu 2009 PDI Perjuangan tidak punya jargon khusus untuk mendongkrak populasinya, sementara partai lain memiliki berbagai ide kreatif dalam menjangkau massa. Pengistilahan PDI Perjuangan sebagai "*partai wong cilik*" ternyata sudah tidak relevan di era tersebut, karena masa pemerintahan yang berkuasa pada periode 2004-2009 sangat memperhatikan nasib rakyat miskin. Selain itu figure Megawati telah terkalahkan oleh keberadaan Susilo Bambang Yudhono yang bersikap agak tegas dan rakyat mampu melihat kondisi seperti itu.

Kemudian dibalik kegagalan PDI Perjuangan pada Pemilu 2009, PDP justru mengalami nasib kurang beruntung. Semangat pembaharuan dalam partai tersebut hanya menghasilkan 0,86% suara dan menempati peringkat enam belas. Menyaksikan hasil yang diperoleh PDP tersebut membuat Ketua Pelaksana Harian Roy BB Janis menyatakan untuk melakukan gugatan secara hukum ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya perolehan yang didapat banyak mengalami kejanggalan. Sebagai partai yang baru, melalui pernyataan tersebut PDP merasa tertipu oleh panitia pelaksanaan Pemilu 2009. Meski sempat melakukan gugatan hukum tersebut, beberapa tokoh petinggi PDP menilai bahwa partainya tidak kalah karena merupakan partai baru, akan tetapi hanya suara yang diharapkan tidak sesuai target (www. Detik.com, 10/05/2009, di unduh 26/02/2014, 14.55 wib). Dengan perolehan suara kurang dari satu persen secara keseluruhan tersebut, secara otomatis menutup kesempatan PDP untuk mengirimkan kader terbaiknya duduk

di keanggotaan legislatif ditingkat pusat maupun daerah. Tertutupnya kesempatan tersebut kemudian dapat diartikan bahwa pembentukan PDP hanya merupakan suatu ajang oligarki elit yang gagal.

Setelah larut dalam hasil Pemilu legislatif tahun 2009, beberapa partai politik kemudian dihadapkan pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Meski sempat kalah pada pelaksanaan Pemilu presiden tahun 2004, ternyata PDI Perjuangan masih percaya diri mengusung Megawati sebagai calon presiden. Lebih menghebohkan lagi, ternyata dalam pencalonan tersebut Megawati berpasangan dengan Prabowo. Menurut beberapa kalangan pengamat politik, strategi yang dilakukan PDI Perjuangan tersebut memang direncanakan untuk gagal. Karena sebagaimana diketahui oleh kalangan umum bahwa Prabowo disinyalir merupakan salah satu pelaku utama berbagai tindakan kerusuhan, termasuk penculikan beberapa aktivis tahun 1998 dan namanya tidak akan bisa dibersihkan dari ingatan historis bangsa Indonesia. Selain itu, dengan bermodalkan kemenangan pada Pemilu legislatif tersebut partai Demokrat kemudian tetap mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden, namun tidak menyertakan Jusuf Kalla sebagai calon wakilnya dan digantikan oleh Boediono. Sedangkan Jusuf Kalla justru maju menjadi calon presiden berpasangan dengan Wiranto melalui partai Golkar.

Harapan besar PDI Perjuangan yang kembali mengusung Megawati dan Prabowo untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 kemudian terjawab. Di samping itu keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono belum dapat tertandingi, meski dipasangkan dengan Boediono.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

No.	Pasangan	Hasil(%)
1.	Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono	60,80%
2.	Megawati dan Prabowo	26,79%
3.	Jusuf Kalla dan Wiranto	12,41%

Sumber: (Muhktie Fajar, 2013: 11)

Pasangan Megawati dan Prabowo hanya memperoleh 26,79% suara, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono memperoleh 60,80% suara, sedangkan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto hanya memperoleh 12,41% suara.

Jika dibandingkan dengan Pemilu presiden tahun 2004 yang terdiri dari lima kontestan, perolehan suara pasangan Megawati-Prabowo tidak mengalami penurunan secara drastis. Perbedaanannya, pada Pemilu presiden tahun 2009 hanya terdapat tiga kontestan pasangan calon. Kondisi tersebut kemudian berbuntut pada peluang kemenangan yang berkurang, karena pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperoleh suara lebih dari 50%. Kegagalan Megawati bersaing dalam Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2009 tersebut menjadi bukti, bahwa nama besar Megawati masih kalah jika disejajarkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati melalui PDI Perjuangan tidak bisa belajar dari kekalahan pada Pemilu 2004. Mereka lebih disibukkan dengan berbagai permasalahan internal dan melupakan bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa mempunyai kinerja lebih bagus. Kekalahan yang dialami PDI Perjuangan kemudian menjadi fenomena politik, bahwa kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999 hanya keberuntungan yang diberikan oleh rezim Orde Baru, karena ketika partai tersebut berjalan sendiri di era reformasi justru tidak mampu menanggung segala beban kinerja pemerintahan. Kemudian jika dikaitkan dengan tradisi konflik internal yang selalu menjadi menu utama PDI Perjuangan memasuki era reformasi, tentu hal itu bukan menjadi dasar penyebab kekalahan beruntun. Beberapa partai pecahan PDI Perjuangan seperti PNBK, PITA dan PDP ternyata tidak mampu bersaing dengan partai induk. Meski sempat bersaing dalam Pemilu (PNBK pada Pemilu 2004 dan PDP pada Pemilu 2009), namun partai pecahan tersebut tidak mampu bersaing dengan waktu yang lebih lama. Mereka kemudian melabur dengan partai yang lain, diluar PDI Perjuangan. Selain itu seperti iklan yang ada di televisi “*apapun makanannya, minumannya teh botol sosro*”, peranan Megawati sangat besar dalam PDI Perjuangan. Tidak hanya menjadi simbol pemersatu partai, dia kemudian juga menjadi matahari tunggal dan keberadaannya mengalahkan struktur partai dan ideologi yang dianut.

5. Kesimpulan

Sebagai pemenang Pemilu 1999, PDI Perjuangan tidak bisa mempertahankan posisi tersebut secara konsisten. Mereka lantas terjebak pada urusan pragmatis yang beriringan dengan terciptanya oligarki politik dalam partai. Pemerintahan Megawati kemudian juga terjebak dalam euphoria kemenangan sebagai penguasa. Mereka juga sibuk dengan urusan pragmatis tanpa memikirkan masyarakat luas. Hasilnya, pada Pemilu 2004 menjadi pelajaran berharga, PDI Perjuangan mengalami kekalahan beruntun. Selain hanya menempati posisi kedua setelah Golkar, sebagai tokoh sentral Megawati bahkan tidak mampu bersaing dengan calon presiden lainnya. Kondisi tersebut kemudian memicu munculnya gerakan internal yang mencoba untuk memperbaiki sirkulasi kinerja partai, namun keberadaan Megawati sebagai simbol partai tidak dapat tergeser, hingga memunculkan konflik internal pada pelaksanaan Kongres II PDI Perjuangan di Bali tahun 2005. Pasca pelaksanaan tersebut konflik internal justru lebih keruh, Gerakan Pembaharuan justru berubah menjadi Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Selanjutnya besarnya simbolisasi terhadap Megawati yang juga berakibat pada munculnya kongsi baru tersebut kemudian berdampak pada kekalahan PDI Perjuangan pada Pemilu 2009. Partai tersebut seolah tidak bisa membaca realitas politik. Di tengah keberadaan figure lain yang lebih kharismatik, PDI Perjuangan di bawah Megawati tidak bisa memberikan bukti politik kepada masyarakat. Sehingga faktor utama inkonsistensi PDI Perjuangan periodisasi antara Pemilu 2004 sampai dengan 2009 dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, PDI Perjuangan tidak mampu menerapkan visi dan misi politik secara maksimal akibat cengkaman oligarki elit dan konflik internal. *Kedua* kondisi tersebut kemudian menjadi momentum fenomena partai Demokrat saat mengusung nama Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menggeser nama Megawati.

Daftar Pustaka

Buku

Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritis*. Jakarta: Rajawali Prens.

Fajar Mukthie 2013. *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.

Gottschalk, Lois. 1983. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Prens.

Ichlasul Amal, Budi Winarno. 1997. *Metodologi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tim Litbang Kompas. 2004. *Partai Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Buku Kompas.

Zulkifli, Arif. 1996. *PDI Di Mata Golongan Menengah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Wawancara

Heri Purwanto, 2013.

Pudjo Setijono, 2013.

Internet

www. Aneka Warta, Jakarta, Kasus Mega Tak Diteruskan, 03/08/2005, 01/05/2013.

www. Bali Post, Denpasar, Mega Terpilih Lagi Secara Aklamasi, 01/04/2005, 10/03/2013, 22.30 wib.

www. Suara Merdeka, Jakarta, Lima Nama Calon Ramaikan Bursa Calon Ketua PDI Perjuangan, 23/01/2005, 11/07/2012, 11.10 wib.

www. Suara Merdeka, Wonogiri, Mega Gagal Pensiun dari Politik, 28/01/2005, 12/12/2012, 09.30 wib.

www. Tempo Interaktif, Jakarta, Eros Djarot Nyekar ke Makam Bung Karno, 08/04/2005, 12/01/2013: 12.30 wib.

www. Tempo Interaktif, Jakarta, Arifin Panigoro Mundur dari Anggota DPR, 18/01/2005, 12/05/2012, 11.30 wib.

- www. Tempo Interaktif, Jakarta, Kwik
Deklarasikan Pemurnian PDI Perjuangan,
30/10/2004, 12/05/2012, 10.30 wib.
- www. Tempo Interaktif, Jakarta, Pemecatan
Justru Pertajam Konflik PDI P, 12/05/2005,
27/04/2013.
- www. Tempo Interaktif. com, Banyuwangi,
*Ratusan Kader PDI Perjuangan Pro Mega
Hadang Kelompok Pembaharuan*,
26/03/2005, 08/02/2013, 16.10 wib.
- www. Tempo. com, Jakarta, Pimpin PDP,
12/01/2005, di unduh 09/08/2013.
- www.Tempo Interaktif. com, Jakarta, Soetardjo
Khawatirkan Partai Laksamana Sukardi,
1/12/2005, 12/11/2013, 22.30 wib
- www.Tempo Interaktif.com, Yogyakarta, PDI
Perjuangan DIY Tidak Terpengaruh Partai
Baru, 02/12/2005, 12/11/2013, 12.30 wib
- www. Detik.com, Jakarta, PDP Menggugat
Pemilu 2009, 10/05/2009, 26/02/2014, 14.55
wib